



**Surat Palsu Kegiatan Sosialisasi Diklat Persiapan Sertifikasi Bendahara Yang Mengatasnamakan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

**Jakarta, 17 Oktober 2019** – Dalam beberapa bulan terakhir telah beredar beberapa surat yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait penyelenggaraan Sosialisasi Diklat Persiapan Sertifikasi Bendahara sebagai berikut:

1. Surat Undangan Nomor SU-618/DPSB-PB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Surat Undangan Nomor SU-718/DPSB-PB/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Satuan Kerja Kantor Camat Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Surat Undangan Nomor SU-718/DPSB-PB/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Satuan Kerja Kantor Inspektorat Daerah;
4. Surat Undangan Nomor SU-718/DPSB-PB/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Dengan ini ditegaskan bahwa seluruh surat tersebut adalah **PALSU**, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut adalah **FIKTIF**.

Selanjutnya, perlu ditegaskan kembali bahwa seluruh rangkaian kegiatan Sertifikasi Bendahara adalah **GRATIS DAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) yang telah ditetapkan, yaitu:

1. 34 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh Indonesia; dan/atau
2. 1 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan 11 Balai Diklat Keuangan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.

Untuk itu kepada seluruh *stakeholders* yang menemui surat palsu tersebut dan/atau surat lain yang sejenis, agar mengabaikan surat tersebut, serta tidak melakukan kontak dalam bentuk apa pun kepada nomor yang tertera dalam surat dimaksud demi mencegah adanya korban dan kerugian yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk melaporkan dan/atau mengonfirmasi kebenaran surat terkait dengan penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara, dapat berkoordinasi dengan UPS yang terdekat dengan wilayah kerja masing-masing, atau dapat juga menghubungi Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi Pusat melalui:

1. Nomor Telepon 021-3846822;
2. Email [sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id](mailto:sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id); atau
3. Layanan *Helpdesk* Terintegrasi HAI DJPb, Nomor *Call Center* 14090 atau *e-mail* [hai.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:hai.djpb@kemenkeu.go.id).

**Narahubung Media:**

Agung Yulianta  
Direktur Sistem Perbendaharaan  
DJPb - Kementerian Keuangan

☎ Telepon. 021-3846822  
Hai DJPb:  
✉ email: [hai.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:hai.djpb@kemenkeu.go.id)  
☎ telp. : 14090